

**ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI
KEDELAI DI DESA BULU TELLUE
KABUPATEN PANGKEP**

Diajukan Oleh :

Aswan Setiawan
4516013045



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Guna Memperoleh Gelar

Sarjana EKONOMI

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA**

MAKASSAR

2020

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kedelai Di
Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Aswan Setiawan

Stambuk/NIM : 4516013045

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Tempat Penelitian : Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep

Telah Disetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr.Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE, M.Si


Rina Fajarina Laming, SE, Ak, M.Si, CA

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa



Dr. H. As-Asyiddin Mane, SE, M.Si, SH, MH

Ketua Program Studi

Akuntansi

Dr. Firman Menne, SE, M.Si, Ak, CA

Tanggal Pengesahan:

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASWAN SETIAWAN

Nim : 4516013045

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Judul : Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kedelai di Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya dan karya ilmiah saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain dalam memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan telah disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini, saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 07 Oktober 2020

Mahasiswa yang bersangkutan

ASWAN SETIAWAN

***ANALYSIS OF PRICE DETERMINATION OF SOYBEAN PRODUCTION IN BULU
TELLUE VILLAGE PANGKEP DISTRICT***

By:

ASWAN SETIAWAN

Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University Makassar

ABSTRACT

ASWAN SETIAWAN. 2020. Description. Analysis of the Determination of Cost of Soybean Production in Bulu Tellue Village, Pangkep Regency, South Sulawesi Province, supervised by Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si and Ripa Fajarina Laming, SE., Ak., M.Si., CA.

The research objective was to determine the determination of the cost of production of soybeans in Bulu Tellue Village. The object of research was soybean plantations in Tondong Tallasa District, Pangkep Regency.

The results show that soybean farmers in Bulu Tellue Village, Pangkep Regency have not calculated the cost of soybean production according to existing accounting rules and costs are not recorded based on existing accounting theories, so farmers do not take into account some of these costs because farmers think these costs is a general cost, which is not included in production costs.

Keywords: Cost of Production, Variable Costing, and Efficiency

ANALISIS PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI KEDELAI DI DESA BULU TELLUE KABUPATEN PANGKEP

Oleh :

ASWAN SETIAWAN

Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bosowa Makassar

ABSTRAK

ASWAN SETIAWAN.2020.Skripsi.Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kedelai di Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si dan Ripa Fajarina Laming, SE.,Ak.,M.Si.,CA.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi kedelai di Desa Bulu Tellue. Objek penelitian adalah Perkebunan kedelai di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petani Petani kedelai di Desa Bulu Tellue, Kabupaten Pangkep belum melakukan perhitungan terhadap harga pokok produksi kedelai sesuai dengan aturan Akuntansi yang ada serta biaya tidak dicatat berdasarkan teori akuntansi yang ada, sehingga petani tidak memperhitungkan beberapa biaya tersebut karena petani beranggapan biaya tersebut merupakan biaya umum, yang tidak dimasukkan dalam biaya produksi.

Kata Kunci : Harga Pokok Produksi, Variable Costing, dan Efisiensi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, serta Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai *Rahmatan lil 'Alamiin* sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan Judul “**Analisis Penentuan Harga Pokok Produksi Kedelai di Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep**”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua dan orang terdekat yang banyak memberikan support agar penulis menyelesaikan tugas skripsi ini dengan sebenarnya dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Rektor Universitas Bosowa Makassar yaitu Bapak Prof. Dr. Ir. Salleh Pallu, M.Eng, Bapak Dr. H.A. Arifuddin Manne, SE., M.Si., SH., MH selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar, serta Bapak Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak.,CA. selaku Ketua Prodi Akuntansi, Ibu Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Ripa Fajarina Laming, SE., M.Si.,Ak.CA selaku pembimbing II yang mampu meluangkan waktunya untuk melakukan pembimbingan baik secara langsung maupun daring.

Makassar, 07 Oktober 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Kerangka Teori.....	6
2.1.1 Pengertian Biaya	6
2.1.2 Pengertian Akuntansi Biaya	6
2.1.3 Harga Pokok Produksi.....	8
2.1.4 Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi.....	10
2.1.5 Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi	16
2.1.6 Metode Harga Pokok Proses	20
2.1.7 Penentuan Biaya Produksi.....	23
2.3 Hipotesis	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Metode Penelitian.....	29
3.1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.1.2 Jenis dan Sumber Data.....	30
3.1.3 Metode Pengumpulan Data.....	30
3.1.4 Metode Analisis Data.....	30

3.2 Definisi Operasional Variabel	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Gambaran Umum	33
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	37
4.1.2 Deskripsi Pemerintahan Kabupaten Pangkep dan kepulauan.....	39
4.1.3 Struktur Organisasi Perangkat daerah.....	40
4.1.4 Deskripsi Pemerintahan Tingkat Kecamatan.....	42
4.1.5 Deskripsi Pemerintahan Tingkat Desa.....	56
4.2 Analisis Data	66
BAB V PENUTUP.....	68
5.1 Simpulan.....	68
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kemajuan dunia usaha jauh berkembang dengan pesat, baik dalam skala besar maupun kecil dan juga perkembangan di sektor industri yang memiliki peran penting dalam sektor perekonomian. Banyaknya industri yang terus bermunculan mengakibatkan timbulnya suatu persaingan di antara industri sejenis. Perusahaan-perusahaan atau industri-industri itu didirikan dan beroperasi dengan suatu tujuan atau rencana yang akan dicapai. Dari sekian banyak tujuan tersebut, yang paling utama adalah mendapatkan keuntungan atau laba. Perusahaan kecil dan menengah yang menghasilkan sesuatu untuk memperoleh keuntungan atau laba.

Komponen pembentukan laba adalah pendapatan yang di peroleh dari hasil penjualan produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sedangkan biaya adalah pengorbanan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi atau menghasilkan sesuatu barang atau jasa. Harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir untuk menentukan besarnya biaya tersebut harus tepat dan akurat sehingga harga pokok akan menunjukkan harga pokok sesungguhnya. Penentuan harga pokok produksi merupakan hal yang sangat penting mengingat manfaat informasi harga pokok produksi adalah untuk menentukan harga jual produk serta penentuan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang akan disajikan dalam neraca.

Pembebanan biaya secara akurat pada obyek biaya bertujuan untuk mengukur dan membebankan seakurat mungkin biaya sumber daya yang digunakan oleh objek biaya. Pada dasarnya dalam keadaan normal, harga jual, produk atau jasa harus dapat menutup biaya penuh yang bersangkutan dengan produk atau jasa dan menghasilkan laba yang dikehendaki. Kenyataannya, penetapan harga jual yang ideal terkadang sulit dilakukan, nilai kurs dan mata uang yang belum stabil, kenaikan harga minyak dunia, serta kenaikan tarif dasar listrik yang akhir-akhir ini kembali marak menyulitkan perusahaan dalam menetapkan perencanaan laba serta harga jual yang sesuai dengan permintaan dan penawaran di pasar konsumen.

Harga pokok produksi sangat berpengaruh dalam perhitungan laba rugi perusahaan, apabila perusahaan kurang teliti atau salah dalam penentuan harga pokok produksi, mengakibatkan kesalahan dalam penentuan laba rugi yang akan diperoleh perusahaan. Mengingat arti pentingnya harga pokok produksi yang memerlukan ketelitian dan ketepatan, dalam persaingan tajam di industri seperti saat ini, memacu perusahaan yang satu bersaing dengan perusahaan yang lain, dalam menghasilkan produk yang sejenis maupun produk substitusi. Karena itulah informasi biaya dan informasi harga pokok produksi sangat diperlukan untuk berbagai pengambilan keputusan.

Kondisi ekonomi seperti sekarang ini, kenaikan biaya-biaya produksi di sektor usaha menyebabkan tidak terciptanya keunggulan bersaing dalam harga jual produk pada perdagangan, khususnya komoditi pertanian seperti kedelai, kopi, minyak sawit, teh, gula, karet, kina, dll. Hal tersebut mempengaruhi kondisi

Indonesia, mengingat Indonesia merupakan negara agraris pengekspor komoditi pertanian terbesar. Diantara komoditi-komoditi pertanian lainnya, kedelai merupakan komoditi yang paling rentan terhadap harga.

Petani kedelai sebagai pengusaha yang menghasilkan kedelai juga berorientasi pada laba, sehingga tidak terlepas dari masalah pencapaian laba dan pengembalian modal, dalam perhitungan harga pokok produksi dan pengumpulan biaya yang digunakan untuk meningkatkan produksi kedelai sebagai produk utamanya. Biaya yang telah dikeluarkan ini seharusnya dipakai sebagai elemen perhitungan pembentukan harga pokok produk. Penentuan harga pokok produksi dibagi dengan kapasitas produksi yang dihasilkan.

Harga jual kedelai di tingkat petani yang rendah tidak dapat dipisahkan dari harga kedelai pasaran internasional. Namun bila dibandingkan dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tata niaga kedelai, petani jelas merupakan pihak yang paling sulit dalam mengelak dari resiko kerugian. Petani kedelai mengeluarkan sejumlah biaya yang tidak dapat disesuaikan secara leluasa dengan perubahan harga jual kedelai. Hal tersebut tidak berarti juga harga jual kedelai di tingkat petani harus selalu berada di atas harga pokok produksinya.

Harga kedelai di tingkat petani tidak dapat dipisahkan dari harga jual kedelai di pasaran internasional. Namun, dengan mengetahui harga jual kedelai di tingkat petani terhadap harga pokok produksinya, penulis berharap dapat membantu petani untuk mengambil keputusan untuk menahan atau menjual kedelainya ketika harga pokok produksi berada di atas atau di bawah harga jual kedelai.

Maka dalam hal ini dibutuhkannya suatu penelitian sejauh mana penentuan harga pokok produksi yang merupakan hal yang sangat penting, karena harga pokok produksi dapat digunakan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh petani kedelai. Selama ini petani kedelai telah melakukan perhitungan atas biaya produksi tetapi dalam membuat laporan harga pokok produksinya belum dapat menunjukkan harga pokok produksi yang tepat dan benar sesuai dengan pengumpulan biaya produksinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penentuan harga pokok produksi kedelai pada tingkat petani di Desa Bulu Tellue.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penentuan harga pokok produksi kedelai di Desa Bulu Tellue.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait diantaranya:

1. Bagi petani kedelai, dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menghindari kerugian.
2. Bagi akademisi, sebagai wawasan, pengetahuan dan acuan dalam penentuan harga pokok produksi dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian yang

lebih lanjut.

3. Bagi peneliti, sebagai pelatihan intelektual yang diharapkan dapat mempertajam daya pikir ilmiah serta meningkatkan kompetensi keilmuan dan mengetahui sejauh mana teori yang didapat dibangku kuliah dapat diterapkan di dunia kerja.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Pengertian Biaya

Menjalankan suatu usaha membutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar petani mampu terus berkualitas. Biaya sendiri merupakan hal yang sangat penting dan tidak terpisahkan dalam menentukan harga pokok produksi.

Pengertian biaya menurut Mulyadi (2015) “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.”

Pengertian biaya menurut Siregar dkk (2014) yaitu “*Cost* adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat sekarang atau masa yang akan datang.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa biaya dapat diartikan sebagai nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi yang diukur dalam satuan uang.

2.1.2. Pengertian Akuntansi Biaya

Akuntansi biaya mengukur dan melaporkan setiap informasi keuangan dan non keuangan yang terkait dengan biaya perolehan atau pemanfaatan sumber daya dalam suatu organisasi. Akuntansi biaya memasukkan bagian-bagian akuntansi manajemen

dan akuntansi keuangan tentang bagaimana informasi biaya dikumpulkan dan dianalisa. Akuntansi biaya lebih menekankan pada pengendalian maupun penetapan biaya, terutama yang berhubungan dengan biaya produksi. Selanjutnya akuntansi biaya membantu petani dalam merencanakan dan pengawasan biaya pada aktivitas petani.

Menurut Riwayadi (2014) akuntansi biaya adalah suatu proses pengidentifikasian, pendefinisian, pengukuran, pelaporan, dan analisis berbagai unsur biaya langsung dan biaya tidak langsung yang berhubungan dengan proses menghasilkan dan memasarkan produk, Adapun Menurut Sujarweni (2015) menyatakan bahwa: Akuntansi biaya adalah informasi tentang biaya produksi untuk kepentingan kegiatan manajemen perusahaan industri, yang meliputi bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, penyimpanan, dan penjualan produk jadi.

Fitrah dan Endang (2014), menyatakan bahwa akuntansi biaya merupakan suatu alat bagi manajemen dalam menjalankan aktivitas perusahaan yaitu sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pembuatan keputusan.

Pengertian akuntansi biaya menurut Witjaksono (2013:5) adalah:

1. Sebagai pemasok informasi dasar untuk menentukan harga jual produk barang dan jasa.
2. Sebagai bagian dari alat pengendalian manajemen, terutama yang berkaitan

dengan pengukuran kinerja manajer pusat pertanggung jawaban.

3. Sebagai pemasok informasi pada pihak eksternal berkenaan dengan seluruh aspek biaya operasi, misalnya saja untuk kepentingan pajak

Berdasarkan beberapa definisi akuntansi biaya tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi biaya adalah proses mencatat, menggolongkan, meringkas dan menyajikan biaya, mulai dari proses pembuatan hingga penjualan barang atau jasa dengan cara-cara tertentu serta menyajikan berbagai informasi biaya dalam bentuk laporan biaya. Akuntansi biaya menghasilkan informasi untuk memenuhi berbagai macam tujuan penentuan kos produksi, pengendalian biaya dan tujuan pengambilan keputusan.

2.1.3. Harga Pokok Produksi

2.1.3.1. Pengertian Harga Pokok Produksi

Penerapan harga pokok produksi dilakukan untuk menentukan harga pokok per satuan produk yang akan dijual, sehingga ketika produk tersebut di serahkan, maka petani dapat mengetahui laba atau kerugian yang akan diterima petani setelah dikurangi biaya-biaya lainnya. Maka ketelitian dan ketepatan melakukan perhitungan harga pokok produksi harus diperhatikan karena apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan akan menyebabkan kerugian bagi petani.

Hansen dan Mowen (2013; 55), menyatakan bahwa harga pokok produk adalah pembebanan biaya yang mendukung tujuan manajerial yang spesifik. Artinya penentuan harga pokok suatu produk bergantung pada tujuan manajerial yang spesifik

atau yang ingin dicapai.

Menurut Dunia dan Abdullah (2012) menyatakan bahwa “Harga Pokok Produksi adalah biaya yang terjadi sehubungan dengan produksi, yaitu jumlah biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung.”

Pengertian Harga Pokok Produksi menurut Mulyadi (2015) yaitu “Harga Pokok Produksi dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya yaitu biaya produksi dan biaya non produksi. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengolahan bahan baku menjadi produk, sedangkan biaya non produksi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan non produksi, seperti kegiatan pemasaran dan kegiatan administrasi umum. Biaya produksi membentuk harga pokok produksi, yang digunakan untuk menghitung harga produk yang pada akhir periode akuntansi masih dalam proses. Biaya non produksi ditambahkan pada harga pokok produksi untuk menghitung total harga pokok produk.”

Menurut Samsul (2013), harga pokok produksi adalah biaya untuk menghasilkan produk pada perusahaan manufaktur.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah semua biaya yang digunakan untuk memproses suatu bahan baku hingga menjadi barang jadi dalam suatu periode tertentu. Penentuan Harga Pokok Produksi digunakan untuk perhitungan laba atau rugi petani yang akan dilaporkan kepada pihak eksternal. Selain itu, Harga Pokok Produksi memiliki peranan dalam pengambilan keputusan petani untuk beberapa hal seperti menerima atau menolak

pesanan, membuat atau membeli bahan baku, dan lain-lain. Informasi mengenai Harga Pokok Produksi menjadi dasar bagi manajemen dalam pengambilan keputusan harga jual produk yang bersangkutan. Oleh sebab itu, biaya-biaya yang dikeluarkan petani untuk memproduksi suatu barang jadi dapat diperhitungkan untuk menentukan harga jual yang tepat.

2.1.4. Unsur-Unsur Harga Pokok Produksi

Harga Pokok Produksi terdiri dari tiga elemen biaya produk yaitu Biaya Bahan Baku, Biaya Tenaga Kerja Langsung, dan Biaya *Overhead* Pabrik. Harga Pokok Produksi diperhitungkan dari biaya produksi yang terkait dengan produk yang telah selesai selama periode tertentu.

Menurut Siregar (2014) biaya-biaya produksi dibedakan berdasarkan elemen-elemen, yang terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Biaya Bahan Baku

Pengertian Biaya Bahan Baku menurut Dunia dan Abdullah (2012) “Biaya perolehan dan seluruh bahan langsung yang menjadi bagian yang integral yang membentuk barang jadi (*finished goods*)”.

Pengertian Biaya Bahan Baku menurut Carter (2014) yaitu :“Biaya bahan langsung adalah semua bahan baku yang membentuk bagian integral dari produk jadi dan dimasukkan secara eksplisit dalam perhitungan biaya produksi.”

Berdasarkan definisi di atas Biaya Bahan Baku adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh semua bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi

dan dapat dikalkulasikan secara langsung ke dalam biaya produksi. Bahan baku adalah bahan yang menjadi bagian dari produk jadi dan dapat ditelusuri secara fisik dan mudah ke produk tersebut. Besarnya Biaya Bahan Baku ditentukan oleh biaya perolehannya yaitu dari pembelian sampai dengan biaya dapat digunakan dalam proses produksi.

2. Biaya Tenaga Kerja Langsung

Menurut Muchlis (2013), biaya tenaga kerja adalah harga yang dibayarkan dalam rangka pemakaian dan pemamfaatan sumber daya manusia (human resourch). Biaya ini timbul katika pemakaian biaya berupa tenaga kerja yang dilakukan untuk mengolah bahan menjadi barang jadi atau proses pengolahan bahan baku menjadi suatu produk yang siap dipaasarkan (dijual).

Perngertian Biaya Tenaga Kerja Langsung menurut Carter (2014) sebagai berikut “Biaya tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu.”

Salman (2013) adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi.

Biaya Tenaga Kerja adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengguna tenaga kerja langsung dalam pengolahan suatu produk dari bahan baku menjadi barang jadi. Biaya Tenaga Kerja Langsung meliputi kompensasi atas seluruh tenaga kerja yang dapat ditelusuri ke obyek biaya dengan cara yang ekonomis.

3. Biaya *Overhead* Pabrik

Pengertian Biaya *Overhead* Pabrik menurut Dunia dan Abdullah (2012) “Biaya *Overhead* Pabrik adalah semua biaya untuk memproduksi suatu produk selain dari bahan langsung dan tenaga kerja langsung”.

Pengertian Biaya *Overhead* Pabrik menurut Carter (2014) yaitu “Biaya *Overhead* Pabrik juga disebut *overhead* manufaktur, beban manufaktur, atau beban pabrik terdiri atas semua biaya manufaktur yang tidak ditelusuri secara langsung ke output tertentu, *overhead* pabrik biasanya memasukkan semua biaya manufaktur kecuali bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung.”

Dapat disimpulkan Biaya *Overhead* Pabrik adalah seluruh biaya manufaktur yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Biaya Bahan Baku atau Biaya Tenaga Kerja Langsung serta yang tidak dapat ditelusuri ke unit produksi secara individual. Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung merupakan biaya utama dari suatu produk, namun Biaya *Overhead* Pabrik juga harus terjadi untuk membuat suatu produk. Biaya *Overhead* Pabrik mencakup semua biaya produksi yang tidak termasuk dalam bahan langsung dan tenaga kerja langsung.

Majid, (2013). Biaya ini timbul akibat pemakaian fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk mengolah bahan, seperti mesin, alat-alat, tempat kerja dan lain sebagainya. Biaya *overhead* pabrik merupakan biaya tidak langsung karena itu biaya *overhead* pabrik tidak dapat secara langsung dibebankan ke produk.

Selain itu Dunia dan Abdullah (2012) menyatakan bahwa klasifikasi Biaya

Overhead Pabrik berdasarkan sifat atau objek pengeluaran sebagai berikut :

a) Bahan Baku dan Perlengkapan

Biaya bahan baku dan perlengkapan adalah biaya yang dikeluarkan untuk semua bahan yang dipakai dalam produksi yang tidak dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya tertentu dengan pertimbangan ekonomis dan praktis. Objek biaya tersebut dapat berupa produk atau jumlah unit produk tertentu, pekerjaan-pekerjaan khusus, atau objek biaya lainnya.

b) Tenaga Kerja Tidak Langsung

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi suatu produk, biaya-biaya ini tidak mungkin untuk dibebankan secara langsung objek biaya tertentu. Biaya ini tidak praktis untuk dibebankan secara langsung kepada jumlah unit produksi tertentu.

c) Biaya Tidak Langsung Lainnya

Biaya tidak langsung ini meliputi berbagai macam Biaya *Overhead* Pabrik yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Biaya Bahan Baku maupun Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung.

Adapun penggolongan Biaya *Overhead* Pabrik menurut Mulyadi (2015) menyebutkan Biaya *Overhead* Pabrik dapat digolongkan dengan tiga cara :

a) Penggolongan Biaya *Overhead* Pabrik Menurut Sifatnya

Dalam perusahaan Biaya *Overhead* Pabrik adalah biaya produksi selain Biaya Bahan Baku dan Biaya Tenaga Kerja Langsung. Biaya-biaya produksi yang termasuk

dalam Biaya *Overhead* Pabrik dikelompokkan menjadi beberapa golongan sebagai berikut :

1. Biaya bahan penolong

Biaya bahan penolong adalah bahan yang tidak menjadi bagian produk jadi atau bahan yang meskipun menjadi bagian bagain produk jadi tetapi nilainya relatif kecil bila dibandingkan dengan harga pokok produksi tersebut.

2. Biaya reparasi dan pemeliharaan

Biaya reparasi dan pemeliharaan berupa biaya suku cadang (*spareparts*), biaya bahan habis pakai (*factory supplies*) dan harga perolehan jasa dari pihak luar perusahaan untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan emplasemen, dan aktiva tetap lain yang digunakan untuk keperluan pabrik.

3. Biaya tenaga kerja tidak langsung

Biaya tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga kerja pabrik yang upahnya tidak dapat diperhitungkan secara langsung kepada produk atau pesanan tertentu.

4. Biaya yang timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap

Contoh biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah biaya-biaya depresiasi emplasemen pabrik, bangunan pabrik, mesin dan peralatan, dan aktiva tetap lain yang digunakan di pabrik.

5. Biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu

Contoh biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah biaya-biaya

asuransi gedung dan emplasemen, asuransi mesin dan peralatan, dan biaya amortisasi kerugian *trial-run*.

6. Biaya *Overhead* Pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Contoh Biaya *Overhead* Pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai adalah biaya reparasi yang diserahkan kepada pihak luar perusahaan, biaya listrik PLN dan sebagainya. Penggolongan Biaya *Overhead* Pabrik Menurut Perilakunya dalam Hubungan dengan Perubahan Volume Produksi

Biaya *Overhead* Pabrik dilihat dari perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume produksi dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Biaya *Overhead* Pabrik tetap

Biaya *Overhead* Pabrik tetap adalah Biaya *Overhead* Pabrik yang tidak berubah dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu.

2. Biaya *Overhead* Pabrik variabel

Biaya *Overhead* Pabrik variabel adalah Biaya *Overhead* Pabrik yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.

3. Biaya *Overhead* Pabrik semivariabel

Biaya *Overhead* Pabrik semivariabel adalah Biaya *Overhead* Pabrik yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Untuk keperluan penentuan tarif Biaya *Overhead* Pabrik

Dan untuk pengendalian biaya, Biaya *Overhead* Pabrik semi variabel dibagi

menjadi dua yaitu :

- a) Biaya tetap
- b) Biaya semivariabel.

Penggolongan Biaya *Overhead* Pabrik Menurut Hubungannya dengan Departemen dilihat dari hubungannya dengan departemen-departemen yang ada di pabrik, Biaya *Overhead* Pabrik dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- 4. Biaya *Overhead* Pabrik langsung departemen (*direct departmental overhead expenses*)
- 5. Biaya *Overhead* Pabrik tidak langsung departemen (*indirect departmental overhead expenses*).

Dalam perusahaan manufaktur untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan membutuhkan berbagai jenis biaya, dan biaya-biaya ini akan menjadi dasar dalam penentuan Harga Pokok Produksi. Harga Pokok Produksi dikeluarkan untuk tujuan menghasilkan produk jadi. Harga Pokok Produksi tidak dicatat dalam rekening biaya, melainkan dibebankan pada produk yang dihasilkan dan laporan dalam neraca sebagai persediaan. Harga Pokok Produksi tersebut belum akan tampak dalam Laporan Laba Rugi sebelum produk yang bersangkutan terjual.

2.1.5. Metode Pengumpulan Harga Pokok Produksi

Menurut Neneng Hartati (2017), metode pengumpulan biaya produksi terdiri dari:

- 1. Metode Harga Pokok Pesanan (Job Order Costing) Sistem job order costing

digunakan untuk perusahaan yang memproduksi bermacam-macam produk dalam periode tertentu. Dalam sistem ini, biaya ditelusuri dan dialokasikan ke pekerjaan dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dibagi dengan jumlah unit yang dihasilkan untuk menghasilkan harga rata-rata per unit.

2. Metode Harga Pokok Proses (Process Costing) Sistem process costing digunakan dalam perusahaan yang memproduksi satu jenis produk dalam jumlah besar dalam jangka panjang. Contohnya adalah produksi kertas. Prinsip dasar process costing adalah mengakumulasikan biaya dari operasi atau departemen tertentu selama satu periode penuh (bulanan, kuartalan, dan tahunan) kemudian membaginya dengan jumlah unit yang diproduksi selama periode tersebut.

2.1.5.1. Metode Harga Pokok Pesanan

Menurut Dunia dan Abdullah (2012), Metode harga pokok pesanan adalah “suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun biaya menurut pekerjaan-pekerjaan tertentu.”

menurut Mulyadi (2015) metode perhitungan biaya berdasarkan pesanan adalah “dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dalam jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan.”

Berdasarkan definisi di atas maka penentuan biaya berdasarkan pesanan adalah

sistem penentuan biaya produk yang mengakumulasikan dan membebankan biaya ke pesanan tertentu. Pengolahan produk akan di mulai setelah datangnya pesanan dari langganan/pembeli melalui dokumen pesanan penjualan (*sales order*), yang memuat jenis dan jumlah produk yang dipesan, spesifikasi pesanan, tanggal pesanan, tanggal pesanan diterima, dan harus diserahkan. Atas dasar pesanan penjualan akan dibuat perintah produksi untuk melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan yang dipesan oleh pembeli. Harga pokok pesanan dikumpulkan untuk setiap pesanan sesuai dengan biaya yang dikonsumsi oleh setiap pesanan, jumlah biaya produksi setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai.

2.1.5.2. Karakteristik Metode Harga Pokok Pesanan

Menurut Mulyadi (2015), karakteristik usaha yang produksinya berdasarkan pesanan tersebut di atas berpengaruh terhadap pengumpulan biaya produksi.

Metode pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan yang digunakan dalam perusahaan yang berdasarkan pesanan memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual.
2. Biaya produksi harus golongan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok berikut ini : biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung.

3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut dengan istilah biaya overhead pabrik.
4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka.
5. Harga pokok produksi per unit dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan.

2.1.5.3. Manfaat Informasi Harga Pokok Produksi Per Pesanan

Menurut Mulyadi (2015), dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk :

1. Menentukan Harga Jual Produk

Perusahaan yang memproduksi memproses produk untuk memenuhi persediaan di gudang, dengan demikian biaya produksi dihitung untuk jangka waktu tertentu untuk menghasilkan informasi biaya produksi per satuan produk. Penentuan harga jual produk, biaya produksi per unit merupakan salah satu data yang dipertimbangkan disamping data biaya lain serta data non biaya.

2. Memantau Realisasi Biaya Produksi

Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dibandingkan dengan rencana produksi yang telah ditetapkan, oleh sebab itu akuntansi biaya digunakan dalam jangka waktu tertentu untuk memantau apakah produksi mengkonsumsi total biaya produksi sesuai dengan yang diperhitungkan sebelumnya.

3. Menghitung Laba Rugi Periodik

Guna mengetahui apakah kegiatan produksi dan pemasaran perusahaan dalam periode tertentu mampu menghasilkan laba bruto, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi produk dalam periode tertentu.

4. Menentukan Harga Pokok Persediaan Produk Jadi dan Produk Dalam Proses yang Disajikan dalam Neraca

Saat manajemen dituntut untuk membuat pertanggung jawaban per periode, manajemen harus menyajikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, yang menyajikan harga pokok persediaan produk jadi dan harga pokok yang pada tanggal neraca masih dalam proses, berdasarkan catatan biaya produksi yang masih melekat pada produk jadi yang belum dijual pada tanggal neraca serta dapat diketahui biaya produksinya.

2.1.6. Metode Harga Pokok Proses

Menurut Dunia dan Abdullah (2012), “Metode harga pokok proses bertujuan

untuk menentukan harga pokok atau biaya per unit yaitu dengan membagi biaya pada suatu periode tertentu dengan jumlah unit produk yang dihasilkan pada periode tersebut”.

Menurut Mulyadi (2014) metode perhitungan biaya berdasarkan proses adalah “biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, dan biaya produksi per satuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi dalam proses tertentu, selama periode tertentu, dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan”.

Berdasarkan definisi di atas maka penentuan biaya berdasarkan proses adalah mengakumulasikan biaya produk atau jasa berdasarkan proses atau departemen dan kemudian membebankan biaya tersebut ke sejumlah besar produk yang hampir identik.

2.1.6.1. Karakteristik Metode Harga Pokok Proses

Menurut Mulyadi (2015), metode pengumpulan produksi ditentukan oleh karakteristik proses produk perusahaan. Dalam perusahaan yang memproduksi masa, karakteristik produksinya adalah sebagai berikut :

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

2.1.6.2. Manfaat Informasi Harga Pokok Proses

Menurut Mulyadi (2015), dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan, informasi harga pokok produksi per pesanan bermanfaat bagi manajemen untuk :

1. Menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pesanan
2. Mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan
3. Memantau realisasi biaya produksi
4. Menghitung laba atau rugi tiap pesanan
5. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca.

2.1.7. Metode Harga Pokok Proses

Pengumpulan harga pokok proses ditentukan oleh biaya yang terbentuk dari kumpulan biaya produksi berdasarkan pada produksi massa. Perusahaan yang memproduksi secara massa melaksanakan pengolahan produksinya untuk memenuhi persediaan gudang.

Menurut Mulyadi,(2015) dalam metode ini biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk periode tertentu dan kos produksi per satuan produk yang dihasilkan dalam periode tersebut dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk periode tersebut dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan.

2.1.7.1. Karakteristik Metode Harga Pokok Proses

1. Produk yang dihasilkan merupakan produk standar
2. Produk yang dihasilkan dari bulan ke bulan adalah sama
3. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya perintah produksi yang berisi rencana produksi produk standar untuk jangka waktu tertentu.

2.1.7.2. Manfaat Informasi Harga Pokok Proses

Menurut Mulyadi (2015), dalam perusahaan yang memproduksi massa, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk :

1. Menentukan harga jual produk
2. Memantau realisasi biaya produksi
3. Menghitung laba atau rugi periodik
4. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan neraca.

2.1.8. Penentuan Biaya Produksi

Menurut Mulyadi (2015), metode penentuan kos produk adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi.

Dalam memperhitungkan unsur-unsur biaya ke dalam kos produksi, terdapat dua pendekatan yaitu metode *full costing* dan *variable costing*.

1. Full Costing Method

Metode *full costing* adalah metode penentuan kos produk yang

memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Dengan demikian kos produksi menurut metode *full costing* terdiri dari unsur biaya produksi berikut ini.

Persediaan Awal	xxx
Biaya bahan Baku	xxx
Biaya Tenaga Kerja	xxx
Biaya Overhead Pabrik variabel	xxx
Biaya Overhead Pabrik Tetap	<u>xxx</u>
Total Biaya Produksi	xxx
	xxx
Persediaan Akhir	(xxx)
Harga Pokok Produksi	xxx

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan *Full costing* terdiri dari unsur biaya produksi (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya *overhead* pabrik variabel, dan biaya *overhead* pabrik tetap) ditambah dengan biaya non produksi (biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum).

2. Metode *Variabel Costing*

Metode ini sering disebut juga *Marginal costing* atau *direct costing*. menurut

Mulyadi (2007) mendefinisikan variabel costing sebagai berikut, "*Variabel costing* merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya *overhead* pabrik variabel".

Jadi dengan metode ini harga pokok produk ditentukan berdasarkan besarnya pembebanan biaya pabrikasi yang berkaitan dengan perubahan volume. Dengan kata lain, dalam metode *variabel costing* hanya unsur biaya variabel yang diperhitungkan pada harga pokok produk yang terdiri dari biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung dan biaya *overhead* pabrik variabel. Sedangkan biaya *overhead* pabrik tetap dianggap sebagai biaya periode (*period cost*), yaitu biaya yang dibebankan pada perkiraan laba rugi periode yang bersangkutan. Jadi dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi jangka pendek, biaya *overhead* pabrik tetap tidak akan berubah dan akan tetap menjadi biaya, baik pada saat memproduksi maupun tidak memproduksi.

Penekanan dari perhitungan laba rugi perusahaan menurut metode *variabel costing* terletak pada penyajian biaya yang sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. Dalam metode ini biaya tetap disajikan secara terpisah dan akan ditutup oleh margin kontribusi yang dihasilkan. Margin kontribusi tersebut merupakan kelebihan hasil penjualan dari biaya variabel sebelum menghasilkan laba bersih. Dari penekanan tersebut diharapkan manajemen

dapat memfokuskan perhatiannya pada perilaku biaya tetap dan pengawasan untuk pengambilan keputusan jangka panjang maupun jangka pendek. Hal ini bukan berarti bahwa biaya tetap dianggap sama sekali tidak relevan, tetapi penekanan tersebut bertujuan untuk membedakan relevansi biaya tetap dan biaya variabel terhadap pengambilan berbagai jenis keputusan. Ditinjau dari sudut manajemen, informasi ini sangat berguna baik dari segi perencanaan laba maupun dalam pengambilan keputusan untuk menjual produk.

Variabel costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksinya. Metode *variabel costing* terdiri dari unsur-unsur biaya produksi sebagai berikut :

Persediaan Awal	xxx
Biaya Bahan Baku	xxx
Biaya Tenaga Kerja	xxx
Biaya Overhead Pabrik Variabel	xxx
Total Biaya Produksi	xxx
Persediaan Akhir	xxx
Harga Pokok Produksi	xxx

Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan *variabel costing* terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* pabrik variabel) ditambah dengan biaya non produksi

variabel (biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel) dan biaya tetap (biaya *overhead* pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap).

2.2 Kerangka Pikir



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang harus dibuktikan kebenarannya di dalam kenyataannya, atau penelitian. Menurut Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti (2007), hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris.

Diduga bahwa Penentuan Harga Pokok Produksi Kedelai Pada Tingkat Petani Desa Bulu Tellue belum sesuai dengan aturan akuntansi yang benar.

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bulu Tellue. Kecamatan Tondong Tallasa. Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk angka, atau data kuantitatif yang diangkakan (scoring). Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa catatan keuangan. Data kualitatif menurut Sugiyono (2015) adalah data yang berbentuk kata, skema, dan gambar. Dalam penelitian ini data kualitatif berupa hasil wawancara dengan petani kedelai Desa Bulu Tellue.

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer umumnya berupa data kualitatif, data primer diperoleh dengan mengadakan penelitian dan membagikan kuesioner pada petani kedelai di Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang berfungsi sebagai pelengkap data primer. Data sekunder dapat diperoleh melalui media lain yang bersumber pada buku-buku perpustakaan

atau data-data dari petani kedelai Desa Bulu Tellue Kabupaten Pangkep.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

1. Pengamatan (*observation*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap obyek yang akan diteliti.
2. Wawancara (*interview*) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden atau pihak yang berwenang untuk dimintai keterangan dan pendapatnya secara umum mengenai obyek penelitian dan masalah khusus yang diteliti.
3. Dokumenter yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap data-data mengenai biaya produksi, hasil produksi, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian di dalam perhitungan harga pokok produksi. Data yang dihasilkan dari dokumenter adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diambil dan dicatat pertama kali.

1.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang menguraikan atau menggambarkan bagaimana menentukan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing.

Adapun tahapan- tahapan analisis yang akan dilakukan adalah :

1. Mengidentifikasi biaya-biaya yang timbul di dalam proses produksi
2. Memisahkan biaya-biaya tersebut berdasarkan perilaku biaya, yaitu biaya-biaya variable yang timbul dalam proses produksi.
3. Menghitung biaya bahan baku langsung
4. Menghitung biaya tenaga kerja langsung
5. Menghitung biaya overhead pabrik
6. Menghitung semua biaya-biaya untuk menetapkan harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing.

1.5 Definisi Operasional

1. Harga Pokok Penjualan atau yang biasa disingkat HPP adalah jumlah pengeluaran dan beban yang secara langsung atau tidak langsung untuk menghasilkan produk atau jasa di dalam kondisi dan tempat dimana barang dapat dijual dan digunakan. Singkatnya, Harga Pokok Penjualan atau HPP adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang suatu periode. Harga pokok produksi adalah daftar biaya produksi yang harus dikeluarkan perusahaan pada periode tertentu. Di dalamnya terkait dengan biaya pengadaan bahan baku, alat produksi, bahan pendukung produksi dan lain sebagainya.
2. Akuntansi biaya adalah suatu bidang akuntansi yang diperuntukkan bagi proses pelacakan, pencatatan, dan analisis terhadap biaya-biaya yang berhubungan

dengan aktivitas suatu organisasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Biaya didefinisikan sebagai waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dan menurut konvensi diukur dengan satuan mata uang. Penggunaan kata beban adalah pada saat biaya sudah habis terpakai.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Penelitian

Perkebunan kedelai di Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep mulai ada sejak tahun 2010, saat itu usaha perkebunan kedelai ini hanya percobaan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun usaha ini berkembang pesat dengan semakin banyaknya masyarakat yang turut menanam kedelai dan juga bantuan dari pemerintah dari pihak perhutani yang menyediakan lahan untuk ditanami bibit kedelai. Sampai sekarang usaha kedelai rakyat ini terus berkembang dengan semakin banyaknya lahan-lahan yang akan ditanami bibit kedelai. Dengan bertambahnya lahan maka akan berdampak pada penambahan biaya yang diikuti dengan penambahan hasil produksi yang akan diperoleh dengan metode di atas sepiantas lalu tampaknya tidaklah terlalu sulit untuk menentukan besarnya harga pokok kedelai di tingkat petani. Akan tetapi, karena tiap-tiap petani sebenarnya sama halnya dengan sebuah perusahaan yang berdiri sendiri, maka di lapangan akan ditemukan fakta terdapatnya variasi harga pokok antara satu petani dengan petani lainnya. Sebagaimana halnya ada perusahaan yang efisien dan yang boros, yang dengan demikian berbeda harga pokok produksinya, maka hal yang sama juga terjadi antar petani kedelai. Bila ditelusuri lebih jauh, maka faktor-faktor yang menyebabkan bervariasinya harga pokok kedelai ditingkat petani ini dapat dikelompokkan atas empat faktor utama sebagai berikut : Pertama, faktor geografis, yang dimaksud dengan faktor

geografis dalam hal ini adalah semua faktor yang berkaitan dengan kondisi alam di sekitar kebun kedelai petani yang berpengaruh terhadap harga pokok kedelai di tingkat petani. Misalnya adalah kualitas lahan, dan suhu udara, dan tersedianya atau tidak sumber air di sekitar perkebunan kedelai yang bersangkutan. Kualitas lahan misalnya akan sangat berpengaruh secara langsung terhadap besarnya biaya pemupukan serta hasil panen petani. Semakin subur suatu lahan akan semakin rendah biaya pemupukannya, dan akan semakin tinggi produksi per hektarnya.

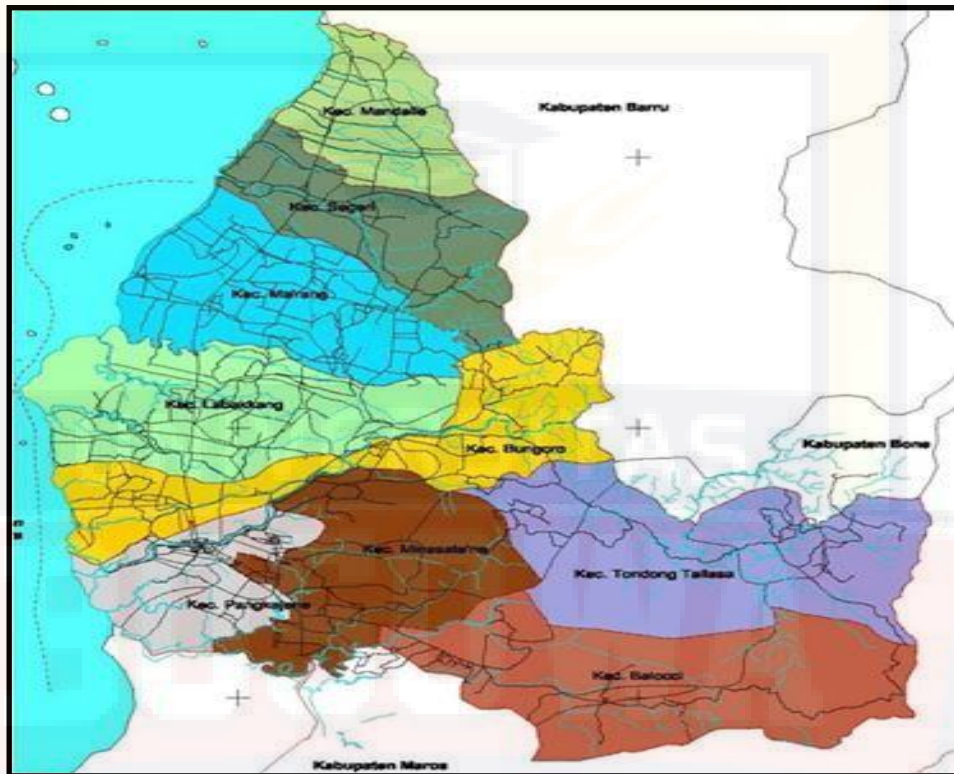
Demikian pula halnya dengan faktor ketinggian dan suhu udara. Semakin tinggi letak kebun kedelai di atas permukaan laut akan semakin dingin suhu udaranya. Hal ini akan berpengaruh terhadap hasil produksi kedelai. Kecukupan persediaan air terutama akan berpengaruh terhadap metode pengolahan kedelai yang dapat dipilih oleh petani. Dan akan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh petani kedelai. Kedua, faktor teknis budidaya. Yang dimaksud dengan faktor teknis budidaya adalah semua faktor cara bercocok tanam serta cara produksi petani yang berpengaruh terhadap harga pokok kedelainya. Faktor teknis budidaya ini tidak terbatas pada periode ketika kedelai mulai berbuah, tapi juga termasuk pada periode sebelum kedelai berbuah. Besar-kecilnya biaya yang dikeluarkan pada kedua periode ini terutama sangat dipengaruhi oleh kultur budidaya serta pengetahuan petani mengenai metode budidaya yang baik. Faktor teknis budidaya ini mencakup baik kelompok biaya tenaga kerja, biaya pengolahan, maupun biaya overhead. Yang berhubungan dengan biaya tenaga kerja misalnya adalah biaya pemangkasan. Sebagaimana diketahui, kebiasaan petani dalam memangkaskan pohon kedelainya sangat bervariasi satu sama lain. Ada

yang memangkas pohon kedelainya sesuai dengan petunjuk teknis yang dianjurkan, dan ada pula yang tidak. Pada kelompok petani yang memangkas pohon kedelainya sesuai dengan petunjuk teknis yang dianjurkan tentu harga pokok kedelainya lebih tinggi daripada kelompok petani yang sebaliknya, Hal ini karena biaya pemangkasan yang dikeluarkan oleh kelompok petani pertama lebih tinggi daripada kelompok kedua. Yang berhubungan dengan biaya pengolahan misalnya adalah biaya pupuk dan obat-obatan. Harga pokok kedelai kelompok petani yang tidak memupuk dan mengobati tanamannya tentu lebih rendah dibandingkan dengan petani yang memupuki dan mengobati tanamannya secara teratur. Besar-kecilnya biaya pupuk dan obat-obatan ini akan berpengaruh secara langsung terhadap jumlah dan mutu produksi, namun harga pokok kedelai per kilogram antara kedua kelompok petani ini akan tetap berbeda. Ketiga, faktor ekonomi. Yang termasuk ke dalam faktor ekonomi adalah faktor perbedaan harga barang dan jasa yang dipakai oleh petani dalam proses budidaya dan produksinya, baik antar daerah maupun antar waktu. Contoh paling nyata mengenai faktor ekonomi ini adalah perbedaan tarif upah. Perbedaan tarif upah ini tentu berpengaruh terhadap harga pokok kedelai masing-masing daerah. Keempat, faktor harga jual kedelai. Faktor harga jual kedelai sebenarnya merupakan bagian dari faktor ekonomi. Akan tetapi, karena faktor ini merupakan faktor spesifik yang mempunyai pengaruh hampir merata terhadap semua petani, maka ada baiknya bila faktor ini dibahas tersendiri Yang dimaksud dengan faktor harga jual dalam hal ini adalah faktor pengaruh tinggi-rendahnya harga jual kedelai di tingkat petani terhadap motivasi petani dalam memelihara dan merawat tanamannya.

Ketika harga jual tinggi maka petani akan menikmati surplus yang cukup besar dari hasil penjualan kedelainya. Dengan surplus yang besar itu, di samping petani dapat meningkatkan kesejahteraannya, petani juga akan termotivasi untuk mengalokasikan sebagian surplusnya itu untuk meningkatkan jumlah dan mutu kedelainya. Petani percaya bahwa pengorbanannya itu akan ada imbalannya di belakang hari. Sebaliknya ketika harga jual rendah, lebih-lebih ketika petani merasa tidak menikmati surplus sama sekali, maka di samping petani akan mengalami kelangkaan dana, ia juga akan merasa bahwa pengorbanannya untuk meningkatkan jumlah dan mutu produksi sebagai pengorbanan yang sia-sia. Pendek kata, berdasarkan tinggi rendahnya harga jual kedelai, dan berdasarkan kecenderungan perubahan harga ini maka harga pokok kedelai di tingkat petani secara relatif akan cenderung meningkat ketika harga jual tinggi dan berkecenderungan naik, dan sebaliknya, walaupun ada batasnya, harga pokok kedelai ditingkat petani akan cenderung menurun ketika harga jual rendah dan berkecenderungan menurun. Berdasarkan uraian di atas jelaslah betapa akan sangat bervariasinya harga pokok kedelai di tingkat petani. Variasi ini tidak hanya akan terjadi antar petani dengan daerah yang berbeda, tetapi juga dapat terjadi antar petani dengan lokasi yang sama, bahkan pada petani yang sama untuk periode waktu yang berbeda. Faktor geografis dan faktor ekonomi akan lebih besar pengaruhnya terhadap variasi harga pokok antar petani dengan daerah berjauhan, Faktor teknis budidaya akan lebih berpengaruh pada para petani dengan daerah yang sama. Sedangkan faktor harga jual akan mempunyai pengaruh yang hampir sama terhadap semua petani.

4.1.1. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Gambar 4.1
Denah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan



Sumber : Kabupaten Pangkep, 2020

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, dengan ibu kota Pangkajene sebagai pusat pelayanan wilayah bagi kabupaten pangkajene dan kepulauan, selain itu karena letaknya yang sangat strategis dekat dengan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pangakejene dan Kepulauan 12.362, 73 (setelah diadakan analisis bakosurtanas) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 , dengan daratan seluas 898,29 , dan panjang garis pantai di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yaitu 250 km, yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 kecamatan, di

mana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan dan 4 kecamatan terletak di wilayah kepulauan.

Batas administrasi dan batas fisik Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barru
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone
- d. Sebelah barat berbatasan dengan pulau Kalimantan, pulau Jawa dan Madura, pulau Nusa Tenggara dan pulau Bali

Secara garis besar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang wilayah alam dari dataran rendah sampai pegunungan. Di mana potensi cukup besar ditandai dengan terdapatnya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer, dan semen. Di samping itu potensi pariwisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan membawahi 13 kecamatan. 13 kecamatan tersebut sebagai berikut:

- a. Liukang Tangaya
- b. Liukang Kalmas
- c. Liukang Tuppabiring
- d. Liukang Tuppabiring Utara
- e. Pangkajene
- f. Minasatene

- g. Balocci
- h. Tondong Tallasa
- i. Bungoro
- j. Labakkang
- k. Ma'rang
- l. Segeri
- m. Mandalle

Penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 berjumlah 332.674 jiwa, yang tersebar di 13 kecamatan, dengan jumlah penduduk terbesar yakni 46.694 jiwa yang mendiami kecamatan Labakkang.

Secara umum, perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan (*sex ratio*), perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki dengan perbandingan 94 laki-laki dibanding dengan 100 perempuan. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi ditemukan dikecamatan Labakkang sebanyak 475 jiwa/ . Sementara tingkat kepadatan penduduk terendah ditemukan dikecamatan tondong tallasa sebanyak 80 jiwa/ .

4.1.2. Deskripsi Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (RPJMD) Tahun 2016-2021, Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah “Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan mewujudkan Desa Modern yang Produktif dan Berkarakter menuju

Daerah yang Lebih Maju dan Mandiri”. Adapun Misi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah;

- a. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan dan memanfaatkan keunikan sebagai kepulauan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b. Meningkatkan Kecerdasan, Profesionalisme, dan karakter Sumber Daya Manusia baik di daratan maupun pulau-pulau.
- c. Mengembangkan interkoneksi dan jejaring sinergis antar wilayah di tingkat nasional, regional dan internasional berbasis daratan dan pulau-pulau.
- d. Meningkatkan lingkungan yang kondusif pada ekosistem daratan dan pulau-pulau.
- e. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada tatanan daratan dan pulau-pulau.

4.1.3. Struktur organisasi perangkat daerah kabupaten pangkajene dan kepulauan

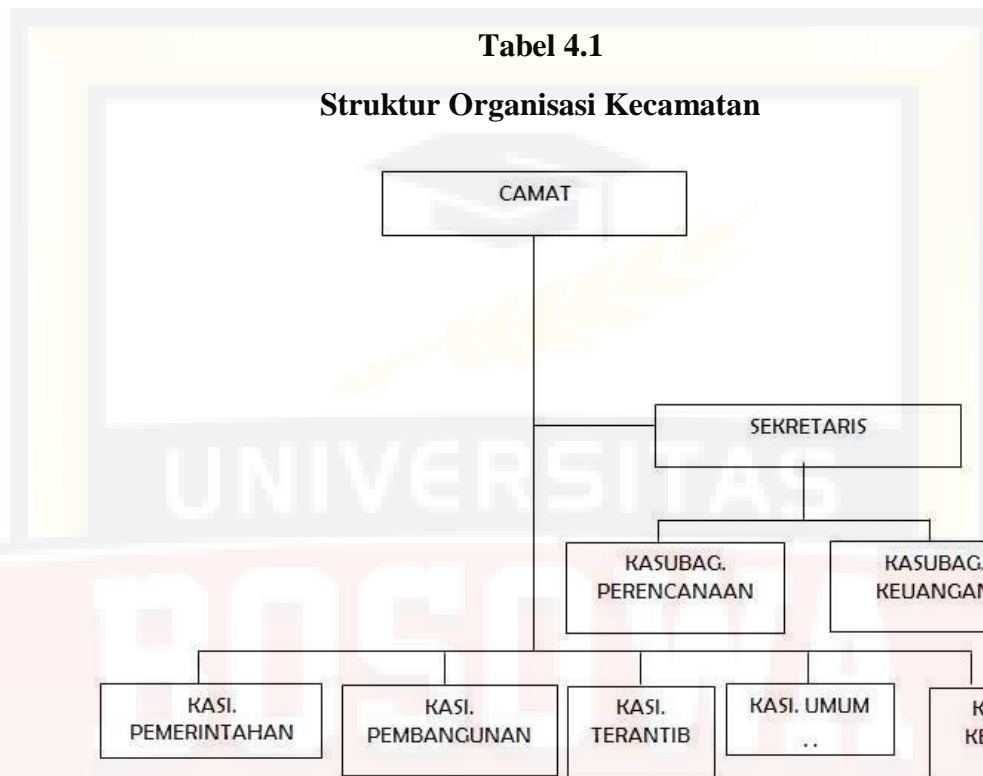
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipimpin oleh seorang bupati dan seorang wakil bupati yang dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah yang membawahi 3 asisten, 2 sekretariat, 1 inspektorat, 26 dinas, 6 badan, dan 13 kecamatan. Dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melibatkan semua unsur kedinasan, tetapi

ada 5 Perangkat Daerah yang mempunyai tugas khusus dalam proses penyusunannya tersebut, yaitu:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- c. Badan Pengelola Keuangan Daerah
- d. Badan Pendapatan Daerah
- e. Sekretariat DPRD

Penelitian kali ini difokuskan pelaksanaannya pada Badan Pengelola Keuangan Daerah yang melakukan pengumpulan RKA Perangkat Daerah dan merangkumnya menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, utamanya dilaksanakan pada bidang Penyusunan Anggaran.

4.1.4. Deskripsi Pemerintahan Tingkat Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.



Sumber : Kecamatan Tondong Tallasa, 2020

A. Camat selaku pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah mempunyai tugas:

1 menyelenggaraan urusan pemerintahan umum, (atas dasar pelimpahan pelaksanaan dari Bupati/Wali kota) yang meliputi:

- a) pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian

Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b) pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c) pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.
 - d) penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e) koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f) pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.
 - g) pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal. (Pendanaan dibebankan pada APBN);
- 2 mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Pendanaan dibebankan pada APBD).
 - 3 mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum (Pendanaan dibebankan pada APBD).

- 4 mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada (Pendanaan dibebankan pada APBD).
- 5 mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (Pendanaan dibebankan pada APBD).
- 6 mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD).
- 7 membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan (Pendanaan dibebankan pada APBD).
- 8 melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan (Pendanaan dibebankan pada APBD).
- 9 melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pendanaan dibebankan kepada yang menugasi).

B. Sekretariat Kecamatan Mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian.

1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian.
2. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.

3. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
4. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

Menyelenggarakan urusan umum, urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, evaluasi dan laporan, administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, administrasi perjalanan dinas, protokol, serta evaluasi kelembagaan. Fungsi dari subbag umum dan kepegawaian

1. merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
2. membagi tugas kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut.
3. memberi petunjuk kepada para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas.

4. memeriksa hasil pekerjaan para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
5. menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.
6. menyelenggarakan urusan surat menyurat, perpustakaan dan kearsipan.
7. menyelenggarakan pelaporan dan kehumasan.
8. menyelenggarakan urusan perlengkapan rumah tangga.
9. menyelenggarakan urusan perjalanan dinas.
10. menyelenggarakan urusan protokol dan hubungan masyarakat.
11. menyelenggarakan administrasi kepegawaian.
12. menyelenggarakan urusan pemeliharaan barang.
13. mengelola organisasi dan tatalaksana serta analisis jabatan dan evaluasi kelembagaan.
14. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
15. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan.
16. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

D. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Perencanaan Program dan Penatausahaan Keuangan di lingkungan Badan.
2. Membuat rencana program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Membagi tugas kepada bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
4. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
5. Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik.
6. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang Badan.
7. Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Badan.
8. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
9. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
11. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
12. Melaksanakan akuntansi Badan.

13. Menyiapkan laporan keuangan Badan.
14. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalananan dan operasional rumah tangga badan.
15. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
16. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan.
17. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan Badan.
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan Perencanaan Program dan Penatausahaan Keuangan di lingkungan Badan.
2. Membuat rencana program kerja Sub Bagian Program dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.
3. Membagi tugas kepada bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
4. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir.
5. Mengkoordinasikan bawahan dalam melaksanakan tugas agar terjalin kerjasama yang baik.

6. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data serta informasi tentang Badan.
7. Menyiapkan Dokumen Perencanaan di lingkungan Badan.
8. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
9. Menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM).
10. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
11. Melakukan verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
12. Melaksanakan akuntansi Badan.
13. Menyiapkan laporan keuangan Badan.
14. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalananan dan operasional rumah tangga badan.
15. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan.
16. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan.
17. Merumuskan rencana strategis, rencana kerja dan program pembangunan tiap tahunnya di lingkungan Badan.
18. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Seksi Pemerintahan tugas dan fungsinya

Seksi pemerintahan mempunya tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemeritahan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
2. Penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan.
3. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan.
4. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan.

Rincian tugas Seksi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Menyusun rencana kerja Seksi pemerintahan.
- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan.
- c) Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggung jawab kepala desa.
- d) Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antara desa/kelurahan di wilayah kerjanya.
- e) Memfasilitasi penataan desa /kelurahan.
- f) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa.
- g) Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan.
- h) Mengkoordinasikan pelaksanaan investarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan.
- i) Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah Negara dari tanah asset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya.
- j) Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan

pembangunan, serta perahlian status tanah dari Negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- k) Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan.
- l) Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan investarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah Negara di wilayah kerjanya.
- m) Membina dan mendistribusikan pelaksana tugas kepada bawahan.
- n) Menilai prestasi kerja sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan.
- o) Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan.
- p) Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Seksi ketenteraman dan ketertiban

Seksi ketenteraman dan ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi ketenteraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum.
- b. Penyusunan program dan kegiatan seksi ketenteraman dan ketertiban.

- c. Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Rincian tugas seksi ketentraman dan ketentraman dan ketertiban Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja seksi ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakkan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam.
- e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal.
- g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat.
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaaman dan ketertiban masyarakat.

H. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok :

Melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor di bidang pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan

penanggulangan bencana.

Seksi perlindungan masyarakat mempunyai fungsi

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembinaan dan pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana.
- b. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pengamanan wilayah serta pencegahan dan penanggulangan bencana terhadap Anggota Satuan perlindungan masyarakat.
- c. Menyusun rencana dan program kerja di bidang perlindungan masyarakat.
- d. Menyusun peta daerah rawan bencana dan melaksanakan pemantauan secara berkala.
- e. Melaksanakan evaluasi dana pelaporan kegiatan.
- f. Melaksanakankomunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bencana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

I. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kepramukaan, peranan wanita, keluarga berencana dan pelayanan kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, kepala seksi kesejahteraan social mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenaga kerjaan.

- b. Fasilitasi penyelenggaraan taman kanak-kanak dan pendidikan dasar di wilayah kerjanya.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan program pendidikan, generasi muda, olahraga, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita, program kesehatan masyarakat serta penyelenggaraan keluarga berencana.
- d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- e. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.
- f. Pelaksanaan penyuluhan program wajib belajar.
- g. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya

J. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi

Melaksanakan dan membina pembangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.

2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan.
3. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.
4. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan perekonomian kelurahan.
5. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan dan PKK.
6. Melaksanakan penyelenggaraan lomba kelurahan terbaik tingkat kecamatan.
7. Melaksanakan penyelenggaraan lomba lingkungan terbaik tingkat kecamatan.
8. Melaksanakan kegiatan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya.
9. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka mensukseskan program Bimbingan Massal (BIMAS), Infeksi Khusus (INFUS), dan penghijauan.
10. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan kemasyarakatan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, serta peranan wanita.
11. Melaksanakan pembinaan terhadap lembaga perekonomian kelurahan.
12. Melaksanakan pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian dan bantuan pembangunan.

13. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
14. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.
15. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

4.1.5. Deskripsi Pemerintahan Tingkat Desa Bulu Tellue Kecamatan Tondong Tallasa Kabupaten Pangkep.

Tabel 4.2



Sumber: Desa Bulu Tellue, 2020

1. Fungsi BPD

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati

peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BDP dalam ranah politik dan sosial desa.

2. Fungsi Kepala Desa

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan

masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.

2. melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

3. fungsi Sekertaris Desa

Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.

3. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Fungsi Kepala Dusun

Untuk melaksanakan tugasnya, maka Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Membina ketenteraman dan ketertiban, melaksanakan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan menata dan mengelola wilayah.
2. Membantu Kasi dan Kaur Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam hal sifat dan jenis kegiatannya tidak dapat dilakukan sendiri
3. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah kerjanya.
4. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya masing-masing.
5. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa.

Disamping tugas dan fungsi sebagaimana yang telah admin sebutkan di atas. Kepala Dusun juga membantu Kepala Desa dalam melaksanakan wewenangnya.

1. Fungsi Kaur Pemerintahan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan Kepala Desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan Kegiatan pencatatan monografi Desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pertahanan sipil; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa.
- 8.

F. Fungsi kaur pembangunan

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas pembantuan.

Fungsi :

- a. Penyiapan bantuan-bantuan analisa & kajian perkembangan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan
- c. Pengelolaan tugas pembantuan; dan
- d. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

G. Fungsi Kaur Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Penyusunan Program Keagamaan serta melaksanakan Program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

Fungsi :

1. Penyiapan bahan untuk pelaksanaan program kegiatan keagamaan
2. Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama

3. Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

H. Fungsi Kaur Keuangan

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Desa.

Fungsi :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa
2. Persiapan bahan penyusunan APB Desa; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

I. Fungsi Kaur Umum

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan.
- b. Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan Desa

- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
- d. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
- e. Pengelolaan administrasi perangkat Desa
- f. Persiapan bahan-bahan laporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

4.2. Deskriptif Data

Petani kedelai di Desa Bulu Tellue setiap tahunnya melakukan pembibitan, pemeliharaan, dan pemanenan kedelai, untuk memperoleh penghasilan. Menurut pemerintah desa para petani menggunakan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksi kedelai, yang terdiri dari 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead. Berikut adalah rincian mengenai ketiga elemen penentuan harga pokok produksi:

A. Biaya Bahan Baku

Dalam proses penanaman kedelai petani membutuhkan bibit kedelai, disamping itu selama proses penanaman kedelai petani juga membutuhkan biaya pupuk, racun untuk hama, serta biaya panen dan pengangkutan hasil panen.

Berikut biaya bahan baku yang digunakan:

Table 4.3

Daftar Biaya Bahan Baku Kedelai

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Pembibitan	Rp.637.500
Pupuk	Rp.350.000
Racun hama	Rp.100.000
Panen dan angkut kedelai	Rp.400.000
Biaya Bahan Baku	Rp.1.487.500

Sumber : Data Diolah, 2020

B. Biaya Tenaga Kerja

Menurut Riwayadi (2014:73) tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi dan pembayaran upahnya berdasarkan unit yang dihasilkan atau berdasarkan jam kerja. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:319) tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk.

Biaya tenaga kerja adalah upah dari tenaga yang mengerjakan proses produksi. Tenaga kerja dapat dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi adalah petani itu sendiri, sedangkan tenaga kerja tidak langsung adalah orang-orang yang membantu saat penanaman dan pemanenan. Berikut nilai dari biaya tenaga kerja tidak langsung:

Table 4.4
Daftar Biaya Tenaga Kerja Tidak Langsung

Jenis Biaya	Jumlah Biaya
Upah penanaman	Rp.300.000
Upah pemanenan	Rp.300.000
Biaya Tenaga Kerja	Rp.600.000

Sumber : Data Diolah, 2020

C. Biaya Overhead

Biaya yang termasuk dalam biaya overhead adalah biaya produksi selain bahan baku dan tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Berikut rincian biaya overhead tetap:

Tabel 4.5
Daftar Biaya Overhead

Jenis biaya	Jumlah biaya
Solar Traktor	RP.77.250
Solar Dros	Rp.77.250
Biaya overhead	Rp.154.500

Sumber : Data Diolah, 2020

4.3. Analisis Data

Sesuai dengan tujuan penelitian. Peneliti mencoba membantu permasalahan petani dalam mengungkap harga pokok produksinya dengan menggunakan metode variabel costing. Pengelompokan Biaya Investasi Harga pokok kedelai, sebagaimana halnya harga pokok komoditi tanaman lainnya, pada dasarnya terdiri dari dua komponen biaya utama. Yang pertama, disebut sebagai komponen biaya investasi (establishment costs). Sedangkan yang kedua disebut sebagai komponen biaya tahunan (annual cost). Biaya- biaya dikelompokkan berdasarkan metode variabel costing dengan luas lahan satu hektar adalah sebagai berikut :

1. Biaya bahan baku:

Pembibitan	Rp.637.500
Pupuk	Rp.350.000
Racun hama	Rp.100.000
Panen dan angkut kedelai	Rp.400.000
2. Biaya Tenaga Kerja

Upah penanaman	Rp.300.000
Upah pemanenan	Rp.300.000
3. Biaya Overhead

Solar traktor	Rp. 77.250
Solar dros	Rp. 77.250

Biaya tahunan adalah biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kedelai memasuki tahun berbuah. Komponen biaya tahunan ini dapat dikelompokkan atas

tiga kelompok biaya sebagai berikut: biaya tenaga kerja, biaya pengolahan, dan biaya overhead. Termasuk dalam kategori biaya tenaga kerja misalnya adalah biaya pemupukan, biaya pengobatan, biaya panen, biaya pengupasan, dan biaya-biaya lain sampai kedelai siap dijual. Termasuk biaya pengolahan antara lain adalah: biaya pupuk, biaya racun hama, serta biaya-biaya lain seperti sewa alat pengupasan. Sedangkan yang termasuk kategori biaya overhead antara lain adalah: biaya karung dan tikar, sewa alat angkutan. Harga pokok produksi yang dihitung dengan pendekatan variabel costing terdiri dari unsur harga pokok produksi variabel (biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel) ditambah dengan biaya non produksi variabel (biaya pemasaran variabel, dan biaya administrasi dan umum variabel) dan biaya tetap (biaya overhead pabrik tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi dan umum tetap). Untuk mengetahui harga pokok per kilogram kedelai di tingkat petani maka total harga pokok sebagaimana di atas harus dibagi dengan jumlah panen rata-rata per tahun.

No.	Tahun	Jumlah Rata Rata Panen Pertahun
1.	2017	50 Ton
2.	2018	65 Ton

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dari pembahasan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Petani kedelai di Desa Bulu Tellue, Kabupaten Pangkep belum melakukan perhitungan terhadap harga pokok produksi kedelai sesuai dengan aturan akuntansi yang ada.
2. Biaya tidak dicatat berdasarkan teori akuntansi yang ada, sehingga petani tidak memperhitungkan beberapa biaya tersebut karena petani beranggapan biaya tersebut merupakan biaya umum, yang tidak dimasukkan dalam biaya produksi.
3. Metode yang digunakan dalam perhitungan harga pokok produksi yang dilakukan oleh penulis adalah metode variable costing untuk membantu para petani dalam melakukan analisis biaya, serta memudahkan petani dalam mengendalikan kondisi operasional yang sedang berjalan.
4. Hasil perhitungan harga pokok produksi kedelai dapat menjadi pedoman dalam mengambil keputusan bagi para petani kedelai.

5.2. Saran

1. Berdasarkan hasil analisis yang di lakukan, penentuan harga pokok produksi harus di perhatikan dengan baik. Tindakan yang harus di lakukan adalah dengan melakukan koreksi perhitungan harga pokok produksi dan

mengidentifikasi biaya-biaya, agar tidak terjadi kenaikan harga pokok produksi sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang maksimal.

2. Untuk penelitian selanjutnya penelitian ini di harapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian yang akan datang. Peneliti selanjutnya juga diharapkan unutup mencari referensi yang lebih banyak sehingga, analisis dan hasil penelitian bisa di lakukan dengan lebih mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Carter, William K dan Usry, Milton F. 2014. *Akuntansi Biaya*. Diterjemahkan oleh Krista. Buku 1. Edisi Keempat Belas. Jakarta: Salemba Empat.
- Daljono. 2011. *Akuntansi Biaya*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dunia, Firdaus A & Abdulah, Wasilah. 2012. *Akuntansi Biaya* Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitrah, Rezanda dan Endang Dwi Retnani. “Penentuan Harga Jual Menggunakan Cost Plus Pricing dengan Pendekatan Variable Costing”. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, Vol. 3, No. 11, (2014): h. 1-14.
- Hansen, Dor R dan Maryanne M Mowen. *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Hartati, Neneng. 2017. *Akuntansi Biaya*. Jawa Barat : Pustaka Setia.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- . 2014 . *Akuntansi Biaya*. Edisi-5. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- .2007. *Activity Based Cost System*. Edisi Enam. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muchlis, Saiful 2013. *Akuntansi Biaya Kontemporer*. Makassar: Alauddin University Press
- Majid, Jamaluddin 2013. *Memahami Akuntansi Manajemen*. Makassar: Alauddin University Press
- Riwayadi.2014. *Akuntansi Biaya.Pendekatan Tradisional dan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Baldric, Bambang Suropto, Dodi Hapsori. dkk. 2014. *Akuntansi Biaya*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Samsul, N.H. 2013. Perbandingan harga pokok produksi full costing dan variabel costing untuk harga jual CV. Pyramid. *Jurnal EMBA*. Vol. 1 No. 3. ISSN 2303-1174.

Salman, Kautsar.2013.Akuntansi Biaya.Cetakan Pertama. Jakarta:

Akademia Permata



LAMPIRAN

Transkrip Wawancara

Informan :Petani Desa Bulu Tellue

Lokasi :Desa Bulu Tellue

Waktu :Oktober 2020

1. Metode apa yang digunakan oleh para petani Desa Bulu Tellu untuk menentukan harga pokok produksi kedelai?

Jawaban :

Petani Desa Bulu Tellue selama ini menggunakan metode variable costing dalam menentukan harga pokok produksinya.

2. Apa kendala yang dialami petani dalam menentukan harga pokok produksi kedelai?

Jawaban :

Terkadang perhitungan yang salah, atau penempatan komponen biaya yang kurang tepat dalam menentukan harga pokok produksi.

3. Bagaimana mengatasi masalah terkait penentuan harga pokok produksi kedelai di Desa Bulu Tellue?

Jawaban :

Melakukan pengawasan terhadap petani kedelai dalam menentukan harga pokok produksi

4. Apa akibat dari kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi?

Jawaban :

Jika petani melakukan kesalahan dalam menentukan harga pokok produksi, maka petani kedelai dapat mengalami kerugian karna biaya yang dikeluarkan

tidak sesuai dengan pendapat petani.

5. Apa saja manfaat dari penentuan harga pokok produksi terhadap petani kedelai di Desa Bulu Tellue?

Jawaban :

Manfaat yang di peroleh petani dari hasil perhitungan harga pokok produksi kedelai sebagai pedoman dalam mengambil keputusan.

